BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59/Permentan/SR.310/12/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 60/Permentan/SR.310/12/2015 TENTANG
ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa karena adanya peningkatan luas tanam khususnya padi dan jagung dan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dari Daerah serta untuk mencukupi kebutuhan pupuk khususnya Urea, SP-36 dan NPK sampai dengan bulan Desember 2016 perlu dilakukan penambahan alokasi Pupuk Bersubsidi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
19. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
21. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun Republik Indonesia 2011 Nomor 491);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
29. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480)
30. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1243);
31. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

33. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi;

Memperhatikan: Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 20/Kpts/SR.320/B/10/2016 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 60/PERMENTAN/SR.310/12/2015 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.

PASAL I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut:
   a. Ketentuan dalam Lampiran I, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
   b. Ketentuan dalam Lampiran II, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
   c. Ketentuan dalam Lampiran III, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

Lampiran I. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 59/Permentan/SR.310/12/2016
Tanggal : 2 Desember 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016
MENURUT SUB SEKTOR

SUB SEKTOR	MENJADI (Ton)				
	UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
Tanaman Pangan	3,368,274	657,800	812,385	2,137,320	637,030
Hortikultura	200,399	52,800	49,350	129,870	68,910
Perkebunan	470,358	147,752	174,930	406,350	65,169
Peternakan	38,092	5,280	11,865	19,440	1,793
Perikanan Budidaya	63,349	16,368	1,470	7,020	6,626
JUMLAH	4,140,472	880,000	1,050,000	2,700,000	779,528

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Lampiran II. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 59/Permentan/SR.310/12/2016
Tanggal : 2 Desember 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (TON)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	ACEH	71,718	22,400	11,989	50,270	4,390
2	SUMATERA UTARA	154,456	53,370	50,000	131,427	18,564
3	SUMATERA BARAT	64,739	31,611	13,253	62,706	8,889
4	J A M B I	31,793	18,000	7,362	51,439	6,194
5	R I A U	35,857	12,596	13,500	49,307	3,287
6	BENGKULU	20,904	7,700	4,392	31,933	4,389
7	SUMATERA SELATAN	145,752	46,942	2,083	104,448	6,923
8	BANGKA BELITUNG	19,894	3,707	2,839	18,791	4,582
9	LAMPUNG	268,245	45,500	14,450	168,472	16,049
10	KEP. RIAU	82	12	6	256	24
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-
12	BANTEN	69,296	21,273	1,200	30,864	4,400
13	JAWA BARAT	588,212	168,936	71,275	367,509	23,640
14	D.I. YOGYAKARTA	43,286	3,574	10,200	25,334	4,125
15	JAWA TENGAH	831,059	175,581	229,153	434,952	255,420
16	JAWA TIMUR	1,103,918	159,102	504,255	627,381	366,232
17	B A L I	39,588	1,184	4,053	23,233	10,565
18	KALIMANTAN BARAT	27,217	10,000	2,179	91,111	3,930
19	KALIMANTAN TENGAH	15,900	3,935	1,033	41,409	2,486
20	KALIMANTAN SELATAN	35,141	6,400	726	41,144	3,450
21	KALIMANTAN TIMUR	14,561	4,175	1,693	29,895	1,122
22	KALIMANTAN UTARA	1,152	171	14	2,763	35
22	SULAWESI UTARA	17,493	3,373	276	12,495	1,215
23	GORONTALO	24,750	998	273	24,013	353
24	SULAWESI TENGAH	29,344	2,725	7,175	28,574	1,777
25	SULAWESI TENGGARA	19,285	6,475	3,797	19,492	4,069
26	SULAWESI SELATAN	277,015	42,418	67,625	134,620	11,588
27	SULAWESI BARAT	22,436	2,040	7,385	23,014	485
28	NUSA TENGGARA BARAT	139,495	19,100	16,000	46,601	7,318
29	NUSA TENGGARA TIMUR	19,409	2,727	1,221	15,222	3,054
30	MALUKU	2,234	225	89	2,115	272
31	PAPUA	5,235	3,487	353	6,120	570
32	MALUKU UTARA	328	133	72	1,566	91
33	PAPUA BARAT	678	130	79	1,524	40
JUMLAH PROPINSI		4,140,472	880,000	1,050,000	2,700,000	779,528

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Lampiran III. Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 59/Permentan/SR.310/12/2016
Tanggal : 2 Desember 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(Ton)

Jenis Pupuk	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
UREA	4,140,472	420,613	319,152	331,551	343,473	355,620	315,767	208,679	328,969	180,511	315,270	425,953	594,914
SP-36	880,000	128,221	71,975	89,943	94,660	81,810	61,835	37,851	69,216	32,601	65,303	71,177	75,408
ZA	1,050,000	125,359	81,883	96,358	86,956	83,062	85,446	49,883	98,988	46,931	89,218	98,407	107,509
NPK	2,700,000	297,072	217,004	266,132	266,585	249,921	216,225	135,314	220,327	131,885	215,980	244,791	238,764
ORGANIK	779,528	64,389	51,330	83,951	80,628	72,296	61,710	37,151	64,841	34,584	74,469	80,491	73,688
JUMLAH PUPUK	9,550,000	1,035,654	741,344	867,935	872,302	842,709	740,983	468,878	782,341	426,512	760,240	920,819	1,090,283

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(Ton)

Jenis Pupuk : UREA

Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Tanaman Pangan	3,368,274	342,169	259,630	269,716	279,416	289,297	256,877	169,760	267,616	146,846	256,472	346,513	483,962
Hortikultura	200,399	20,358	15,447	16,047	16,624	17,212	15,283	10,100	15,922	8,737	15,259	20,616	28,794
Perkebunan	470,358	47,782	36,256	37,664	39,019	40,398	35,872	23,706	37,371	20,506	35,815	48,388	67,581
Peternakan	38,092	3,870	2,936	3,050	3,160	3,272	2,905	1,920	3,027	1,661	2,900	3,919	5,472
Perikanan Budidaya	63,349	6,435	4,883	5,073	5,255	5,441	4,831	3,193	5,033	2,762	4,824	6,517	9,102
JUMLAH	4,140,472	420,614	319,152	331,550	343,474	355,620	315,768	208,679	328,969	180,512	315,270	425,953	594,911

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(Ton)

Jenis Pupuk : SP-36

Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Tanaman Pangan	657,800	95,845	53,802	67,232	70,758	61,153	46,222	28,293	51,739	24,369	48,814	53,205	56,368
Hortikultura	52,800	7,693	4,319	5,397	5,680	4,909	3,710	2,271	4,153	1,956	3,918	4,270	4,524
Perkebunan	147,752	21,528	12,085	15,101	15,893	13,736	10,382	6,355	11,621	5,474	10,964	11,951	12,662
Peternakan	5,280	770	431	539	568	490	371	227	415	196	392	428	453
Perikanan Budidaya	16,368	2,384	1,339	1,673	1,761	1,522	1,151	704	1,288	606	1,215	1,324	1,401
JUMLAH	880,000	128,220	71,976	89,942	94,660	81,810	61,836	37,850	69,216	32,601	65,303	71,178	75,408

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

Jenis Pupuk : ZA (Ton)

Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Tanaman Pangan	812,385	96,990	63,353	74,552	67,278	64,265	66,110	38,594	76,587	36,310	69,028	76,138	83,180
Hortikultura	49,350	5,892	3,848	4,529	4,087	3,904	4,016	2,344	4,652	2,206	4,193	4,626	5,053
Perkebunan	174,930	20,885	13,642	16,053	14,487	13,838	14,235	8,310	16,491	7,819	14,864	16,395	17,911
Peternakan	11,865	1,416	925	1,089	983	939	966	564	1,119	530	1,008	1,112	1,214
Perikanan Budidaya	1,470	175	115	135	122	116	120	70	139	66	125	137	150
JUMLAH	1,050,000	125,358	81,883	96,358	86,957	83,062	85,447	49,882	98,988	46,931	89,218	98,408	107,508

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

Jenis Pupuk : NPK (Ton)

Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Tanaman Pangan	2,137,320	235,162	171,781	210,670	211,029	197,837	171,164	107,114	174,411	104,400	170,970	193,777	189,005
Hortikultura	129,870	14,290	10,438	12,801	12,822	12,021	10,400	6,509	10,598	6,343	10,388	11,774	11,486
Perkebunan	406,350	44,709	32,659	40,053	40,121	37,613	32,542	20,364	33,159	19,849	32,505	36,841	35,935
Peternakan	19,440	2,139	1,563	1,916	1,919	1,799	1,557	974	1,586	950	1,555	1,762	1,720
Perikanan Budidaya	7,020	772	564	692	693	650	562	352	573	343	562	636	621
JUMLAH	2,700,000	297,072	217,005	266,132	266,584	249,920	216,225	135,313	220,327	131,885	215,980	244,790	238,767

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

Jenis Pupuk : ORGANIK (Ton)

Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Tanaman Pangan	637,030	52,618	41,947	68,605	65,890	59,081	50,429	30,360	52,989	28,262	60,856	65,777	60,216
Hortikultura	68,910	5,692	4,538	7,421	7,128	6,391	5,455	3,284	5,732	3,057	6,583	7,115	6,514
Perkebunan	65,169	5,383	4,291	7,018	6,741	6,044	5,159	3,106	5,421	2,891	6,226	6,729	6,160
Peternakan	1,793	148	118	193	185	166	142	85	149	80	171	185	171
Perikanan Budidaya	6,626	548	436	713	685	615	525	316	551	294	633	684	626
JUMLAH	779,528	64,389	51,330	83,950	80,629	72,297	61,710	37,151	64,842	34,584	74,469	80,490	73,687

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

Jenis Pupuk : ZA

(Ton)

Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Tanaman Pangan	812,385	96,990	63,353	74,552	67,278	64,265	66,110	38,594	76,587	36,310	69,028	76,138	83,180
Hortikultura	49,350	5,892	3,848	4,529	4,087	3,904	4,016	2,344	4,652	2,206	4,193	4,626	5,053
Perkebunan	174,930	20,885	13,642	16,053	14,487	13,838	14,235	8,310	16,491	7,819	14,864	16,395	17,911
Peternakan	11,865	1,416	925	1,089	983	939	966	564	1,119	530	1,008	1,112	1,214
Perikanan Budidaya	1,470	175	115	135	122	116	120	70	139	66	125	137	150
JUMLAH	1,050,000	125,358	81,883	96,358	86,957	83,062	85,447	49,882	98,988	46,931	89,218	98,408	107,508

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

Jenis Pupuk : NPK

(Ton)

Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Tanaman Pangan	2,137,320	235,162	171,781	210,670	211,029	197,837	171,164	107,114	174,411	104,400	170,970	193,777	189,005
Hortikultura	129,870	14,290	10,438	12,801	12,822	12,021	10,400	6,509	10,598	6,343	10,388	11,774	11,486
Perkebunan	406,350	44,709	32,659	40,053	40,121	37,613	32,542	20,364	33,159	19,849	32,505	36,841	35,935
Peternakan	19,440	2,139	1,563	1,916	1,919	1,799	1,557	974	1,586	950	1,555	1,762	1,720
Perikanan Budidaya	7,020	772	564	692	693	650	562	352	573	343	562	636	621
JUMLAH	2,700,000	297,072	217,005	266,132	266,584	249,920	216,225	135,313	220,327	131,885	215,980	244,790	238,767

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016 MENURUT SUBSEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

Jenis Pupuk : ORGANIK

(Ton)

Sub Sektor	Setahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
Tanaman Pangan	637,030	52,618	41,947	68,605	65,890	59,081	50,429	30,360	52,989	28,262	60,856	65,777	60,216
Hortikultura	68,910	5,692	4,538	7,421	7,128	6,391	5,455	3,284	5,732	3,057	6,583	7,115	6,514
Perkebunan	65,169	5,383	4,291	7,018	6,741	6,044	5,159	3,106	5,421	2,891	6,226	6,729	6,160
Peternakan	1,793	148	118	193	185	166	142	85	149	80	171	185	171
Perikanan Budidaya	6,626	548	436	713	685	615	525	316	551	294	633	684	626
JUMLAH	779,528	64,389	51,330	83,950	80,629	72,297	61,710	37,151	64,842	34,584	74,469	80,490	73,687

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN